

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Aset Tetap Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung

Sintia Lestari, Muhammad Luthfi, dan Azli Fahrizal

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Malahayati, Bandar Lampung

Email : sintialestari480@yahoo.co.id

Abstract, This study is aimed to test the effect of Local Government Revenue (PAD) and Transfer Funds in allocating Capital Expenditure in districts/cities in Lampung Province. The analytical method for determining statistical tests with SPSS (Statistical Package for the Social) 17.00 software, with 10 regency/city as sample for every year from 14 regency/city at Lampung Province. This research is done for 2007-2012. The data used is Budget Realization Statements of districts/cities in Lampung by Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah (www.djpk.depkeu.go.id). Based on the results of this study concluded that either altogether or in partial test, Local Government Revenue (PAD) and Transfer Funds did not significantly influence to Capital Expenditure fixed assets.

Keywords : Local Government Revenue (PAD), Transfer Funds, Capital Expenditure fixed assets

1. Latar Belakang

Kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah memberi kewenangan yang lebih luas kepada Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan semua urusan pemerintah khususnya pada pengelolaan keuangan daerah. Otonomi daerah merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi. Otonomi daerah yang mulai diberlakukan secara efektif tahun 2001 berimplikasi pada perubahan dalam sistem pembuatan keputusan terkait dengan pengalokasian sumber daya dalam anggaran Pemerintah Daerah. Perwujudan dari kebijakan dan sekaligus operasionalisasi pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah dengan melaksanakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) (Darwanto & Yulia, 2007).

Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam organisasi sektor publik adalah mengenai pengalokasian anggaran. Dengan sumber daya yang terbatas, Pemerintah Daerah harus dapat mengalokasikan penerimaan yang diperoleh untuk belanja daerah yang bersifat produktif. Namun selama ini, Pemerintah Daerah lebih banyak menggunakan pendapatan daerah untuk keperluan belanja operasi dari pada belanja modal. Pengalokasian belanja modal ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan aset tetap Pemerintah Daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya (Darwanto & Yulia, 2007). Sumber dana bagi daerah yang digunakan untuk membiayai belanja daerah terdiri pendapatan asli daerah, Dana Perimbangan dan lain-lain penerimaan yang sah (Permendagri No. 13 tahun 2006).

Sumber keuangan yang berasal dari PAD lebih penting dibanding dengan sumber yang berasal dari luar PAD. Hal ini dikarenakan PAD dapat dipergunakan sesuai dengan kehendak dan inisiatif Pemerintah Daerah demi kelancaran penyelenggaraan urusan daerahnya. Peningkatan PAD diharapkan meningkatkan investasi belanja modal Pemerintah Daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik tetapi yang terjadi adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah tidak diikuti dengan kenaikan anggaran belanja modal yang signifikan, hal ini disebabkan karena Pendapatan Asli Daerah tersebut banyak tersedot untuk membiayai belanja lainnya.

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah. Transfer dari Pemerintah Pusat ini dalam penggunaannya Pemerintah Daerah harus memperhatikan aspek efektif dan efisien untuk mensejahterakan masyarakat dengan meningkatkan pelayanan kepada publik (dapat digunakan untuk meningkatkan belanja modal). Selain itu, dalam penggunaannya harus secara transparan dan akuntabel. Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi (kalau tidak mungkin menghilangkan) kesenjangan fiskal antar pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh negeri (Simanjuntak dalam Prakosa, 2004). Namun kenyataannya, transfer dari Pemerintah Pusat merupakan sumber utama pendapatan Pemerintah Daerah. Dana dari Pemerintah Pusat digunakan oleh Pemerintah Daerah secara efektif dan efisien untuk meningkatkan pelayanan kepada publik (dapat digunakan untuk meningkatkan belanja modal), namun kenyataannya Dana Perimbangan lebih banyak digunakan untuk keperluan belanja operasi dari pada belanja modal (Abdullah & Halim, 2006).

Secara konseptual, perubahan pendapatan akan berpengaruh terhadap belanja atau pengeluaran, namun tidak selalu seluruh tambahan pendapatan tersebut akan dialokasikan dalam belanja (Abdullah & Halim, 2006).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007) serta Tuasikal (2008) memperoleh hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Namun terkadang peningkatan PAD tidak selalu diikuti dengan peningkatan anggaran belanja modal karena PAD banyak terserap untuk membiayai belanja lainnya. Penelitian yang dilakukan oleh Rizanda (2013) dan Abdullah & Halim (2006) memperoleh hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini disebabkan karena PAD yang diperoleh lebih banyak digunakan untuk membiayai belanja lainnya, seperti belanja pegawai dan keseharian Pemerintah Daerah. Tuasikal (2008), dalam penelitiannya menyatakan bahwa dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal. Menurut Sulistyowati (2011) DAU berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal, sedangkan DAK berpengaruh negatif terhadap alokasi belanja modal. Hasil penelitian Aprizay, dkk (2014) menunjukkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap belanja modal, hal ini disebabkan karena pemda tidak mengalokasikan dengan baik penerimaan dana transfer Pemerintah Pusat terhadap belanja modal. Pemda lebih memilih memusatkan pengeluaran terhadap belanja rutin daerah yang tidak produktif. Terkait dengan luasnya lingkup dan permasalahan serta keterbatasan waktu dalam penelitian, maka penelitian ini dibatasi pada Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Aset Tetap pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun 2007 sampai dengan tahun 2012. Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Belanja Modal Aset Tetap baik secara parsial maupun simultan.

2. Kajian Pustaka

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi Daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan desentralisasi (UU No 33 Tahun 2004). Menurut Halim (2007), "pendapatan asli Daerah merupakan semua penerimaan Daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli Daerah. Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 pendapatan asli Daerah bersumber dari :

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang sah

Dana Perimbangan

Sumber pembiayaan Pemerintah Daerah dalam rangka perimbangan keuangan Pemerintah pusat dan Daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi dan pembantuan. Pelaksanaan desentralisasi dilakukan dengan Pemerintah pusat menyerahkan wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri Daerahnya. Wujud desentralisasi yaitu pemberian dana perimbangan kepada Pemerintah Daerah. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, dana perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar-Pemerintah Daerah (UU No 33 tahun 2004).

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, dana perimbangan tersebut dibentuk untuk mendukung pendanaan program otonomi. Berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dana perimbangan meliputi dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil sumber daya alam, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

Belanja Modal Aset Tetap

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun standar, belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan Pemerintah. Menurut Permendagri No. 13 tahun 2006, belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 huruf c digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Sedangkan dalam PSAP No. 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Adapun jenis belanja modal menurut PSAP No. 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 terbagai ke dalam enam pos, yaitu :

- 1 . Belanja modal tanah
2. Belanja modal peralatan dan mesin
3. Belanja modal gedung dan bangunan
4. Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan
5. Belanja modal aset tetap lainnya
6. Belanja aset lainnya.

3. Metode Penelitian

Populasi Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas Objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012). Populasi dalam penelitian ini adalah laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung yang dipublikasikan di situs Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah. Populasi dalam penelitian ini terdiri atas 6 tahun laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dari 12 kabupaten dan 2 kota.

Sampel Penelitian

Sampel dalam penelitian ini terdiri atas 6 tahun laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dari 10 Kabupaten/Kota periode tahun 2007 sampai dengan 2012. Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non probability sampling* dengan pendekatan *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu sesuai dengan objek penelitian. Pertimbangan pemilihan sampel tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kabupaten/Kota yang mempublikasikan laporan keuangan konsisten tahun 2007 sampai dengan 2012.
2. Kemudahan dalam memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian.
3. Laporan keuangan delapan tahun terakhir akan memberikan gambaran terbaru mengenai perkembangan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Aset Tetap sehingga dapat terlihat pertumbuhan dari masing-masing variabel tersebut.

Yang memenuhi kriteria sebagai sampel sebanyak 10 Kabupaten/Kota yaitu kabupaten Lampung Barat, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Utara, Lampung Timur, Tanggamus, Tulang Bawang, Way Kanan, kota Bandar Lampung, dan kota Metro. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari dokumen APBD serta laporan realisasi APBD yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah melalui www.djpk.depkeu.go.id.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan suatu cara atau proses pengumpulan, pencatatan dan penyajian fakta secara sistematis untuk tujuan tertentu. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan studi pustaka. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dengan jenis *time series* data dan *cross section* data (data panel) dalam bentuk tahunan yang bersumber dari dokumen APBD serta laporan realisasi APBD yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah melalui. Periode data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah tahun 2007 sampai dengan tahun 2012.

Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan, dan dikembangkan suatu pengetahuan sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah (Sugiyono, 2012). Dalam penelitian ini, teknik pengolahan data yang digunakan adalah analisis kuantitatif yang dinyatakan dengan angka-angka dan perhitungannya menggunakan metode statistik yang dibantu dengan program *Software SPSS 17 for Windows*. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji normalitas, pengujian asumsi klasik, analisis regresi berganda dan uji hipotesis.

Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2006), uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji normal *Kolmogorov Smirnov*.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan cara untuk mengetahui apakah model regresi yang diperoleh dapat menghasilkan estimator linier yang baik (Nugroho, 2005).

Uji Multikolinieritas

Menurut Ghozali (2006), uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas di dalam regresi dapat dilihat dari *tolerance value* dan nilai *variance inflation factor* (VIF).

Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2006), uji outokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Uji autokorelasi dapat dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-Watson (DW) dengan ketentuan sebagai berikut (Ghozali, 2006) :

Tabel 3.1.
Dasar Pengambilan Keputusan Uji Durbin-Watson

Hipotesis nol	Keputusan	Jika
Tidak ada Autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < dl$
Tidak ada Autokorelasi positif	<i>No decision</i>	$dl \leq d \leq du$
Tidak ada korelasi negatif	Tolak	$4-dl < d < 4$
Tidak ada korelasi negatif	<i>No decision</i>	$4-du \leq d \leq 4-dl$
Tidak ada Autokorelasi positif/ negative	Tidakditolak	$du < d < 4-du$

Sumber: Ghozali, 2006

Uji heteroskedastisitas, bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi perbedaan *variance* residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. Jika *variance* residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki kesamaan *variance* residual suatu periode pengamatan dengan pengamatan yang lain atau homoskedastisitas dan tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2006).

Metode Regresi Linier Berganda

Menurut sugiyono (2012), analisis linier regresi digunakan untuk melakukan prediksi bagaimana perubahan nilai variabel dependen bila nilai variabel independen dinaikan/diturunkan. Analisis regresi linier berganda, yang bertujuan untuk memprediksi kekuatan pengaruh variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal Aset Tetap. Hubungan antar variabel tersebut dapat digambarkan dengan persamaan sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

- Dimana : Y = Belanja Modal Aset Tetap
- a = Konstanta
- b = Slope atau Koefisien Regresi
- X₁ = Logaritma natural Pendapatan Asli Daerah
- X₂ = Logaritma natural Dana Perimbangan
- e = error

Uji Hipotesis

Uji Parsial (Uji Statistik t)

Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Untuk pengujian secara parsial ini digunakan uji-t. Cara melakukan uji t adalah dengan membandingkan t hitung dengan t table pada derajat kepercayaan 5%.

Uji Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik f pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen atau terikat (Ghozali, 2006). Uji f dapat dilakukan dengan melihat nilai signifikansi f pada output hasil regresi menggunakan Spss dengan *significance* level 0,05 (α = 5%).

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tujuan pengujian ini adalah untuk menguji tingkat keeratan atau keterikatan antar variabel dependen dan variabel independen yang bisa dilihat dari besarnya nilai koefisien determinan determinasi (Adjusted R-square). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu (0 ≤ R² ≤ 1). Nilai yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Secara umum, koefisien determinasi untuk data runtun waktu (time series) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi (Ghozali, 2006).

4. Hasil Dan Pembahasan

Uji Normalitas

Berdasarkan hasil uji Kolmogorov-Smirnov diperoleh nilai *Asymp.Sig.(2-tailed)* dari Belanja Modal Aset Tetap, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan masing-masing sebesar 0.636, 0.000 dan 0.909. Nilai Belanja Modal Aset Tetap dan Dana Perimbangan lebih besar dari 0,05 sehingga BMAT dan Dana Perimbangan dapat dikatakan berdistribusi normal serta dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal Aset Tetap dan Dana Perimbangan dapat memenuhi uji normalitas. Namun tidak dengan variabel Pendapatan Asli Daerah, dimana nilai *Asymp.Sig.(2-tailed)* dari PAD menunjukkan nilai lebih kecil dari 0.05 yaitu 0.000 ($0.000 < 0.05$). artinya variabel PAD tidak berdistribusi secara normal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan tidak memenuhi uji normalitas.

Data yang tidak terdistribusi secara normal dapat ditransformasi agar menjadi normal, salah satunya dengan melakukan transformasi kedalam fungsi Logaritma natural (Ln) (Ghozali, 2006). Hasil uji Kolmogorov-Smirnov setelah ditransformasi kedalam fungsi Logaritma natural, menunjukkan nilai *Asymp.Sig.(2-tailed)* dari Belanja Modal Aset Tetap, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan setelah Ln adalah 0.378, 0.076 dan 0.125. Dengan demikian data terdistribusi secara normal, dimana nilai *Asymp.Sig.(2-tailed)* masing-masing variabel lebih besar dari 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa LnBMAT, LnPAD dan LnDP memenuhi uji normalitas.

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinieritas

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas diketahui bahwa nilai variabel LnPAD dan LnDP memiliki nilai *tolerance* dan VIF yang sama yaitu 0.999 dan 1.001, dimana nilai *tolerance* tersebut lebih dari 0.1 dan nilai VIF tidak lebih dari 10 ($0.999 > 0.1$ dan $1.001 < 10$). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan korelasi yang kuat antar variabel independen, sehingga model regresi yang digunakan terhindar dari permasalahan multikolinieritas.

Uji Autokorelasi

Berdasarkan hasil uji Autokorelasi nilai Durbin Watson adalah 1,675, dengan jumlah observasi (N) 60, jumlah variabel bebas 2, nilai $dl = 1,514$ dan $du = 1,652$, dimana $4 - du = 2,348$ ($4 - 1,652$) sehingga pada model persamaan regresi nilai DW berada pada daerah $du < d < 4 - du$ ($1,652 < 1,675 < 2,348$). Dengan demikian model persamaan regresi bebas dari masalah autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Hasil dari uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa tidak adanya pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah 0 pada sumbu Y. Dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi ini, sehingga model regresi layak digunakan untuk memprediksi variabel dependen (LnBMAT) berdasarkan masukan variabel independen LnPAD dan LnDP.

Analisis Regresi Linier Berganda

Berdasarkan hasil regresi dapat disusun persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{LnY} &= + \text{Ln} + \text{Ln} + \\ \text{LnY} &= 26.6 + 0.063 - 0.093 + \end{aligned}$$

Dari persamaan regresi diatas dapat disimpulkan bahwa Nilai konstanta sebesar 26,6, artinya apabila nilai variabel LnPAD dan LnDP bernilai 0, maka nilai Ln Belanja Modal Aset Tetap adalah 26,6. Variabel LnPAD memiliki koefisien regresi bertanda positif sebesar 0,063, artinya apabila terjadi perubahan variabel Ln Pendapatan Asli Daerah sebesar 1% maka akan meningkatkan Ln Belanja Modal Aset Tetap sebesar 0,063%. Sedangkan Variabel LnDP memiliki koefisien regresi bertanda negatif sebesar 0,093, artinya apabila terjadi perubahan variabel Ln Dana Perimbangan sebesar 1% maka akan mengakibatkan Ln Belanja Modal Aset Tetap menurun sebesar 0,093%.

Uji Hipotesis

Uji Parsial dengan t-Test

Berdasarkan hasil uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa :

1. Variabel Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai t_{hitung} sebesar 0,761 dengan signifikansi sebesar 0,450. Nilai signifikan untuk variabel LnPAD menunjukkan nilai diatas tingkat signifikan 0,05 ($0,450 > 0,05$) dan nilai $t_{hitung} 0,761 < t_{tabel}$ sebesar 2,0017 yang artinya bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal Aset Tetap.
2. Variabel Dana Perimbangan memiliki nilai t_{hitung} negatif sebesar -0,677 dengan signifikansi sebesar 0,501. Nilai signifikan untuk variabel LnPAD menunjukkan nilai diatas tingkat signifikan 0,05 ($0,501 > 0,05$) dan nilai $t_{hitung} -0,677 < t_{tabel}$ sebesar 2,0017 yang artinya bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal Aset Tetap.

Uji Simultan (Uji F-Test)

Hasil Uji statistik F menunjukkan nilai F-hitung sebesar 0,500 dengan nilai signifikansi 0,609 hal ini berarti tingkat signifikansi $> 5\%$ ($= 0,05$) dan F_{hitung} sebesar 0,500 $< F_{tabel}$ sebesar 3,15 ($df1 = 3-1$, $df2 = 60-3$) yang artinya H_0 diterima dan H_a ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara simultan tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal Aset Tetap.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Hasil analisis regresi berganda dapat diketahui koefisien determinasi (Adjusted R Square) sebesar -0,17. Menurut Gujarati (2003) dalam Ghazali (2006) jika dalam uji empiris didapat nilai adjusted R^2 negatif, maka nilai adjusted R^2 dianggap bernilai nol. Artinya variabel Belanja Modal Aset Tetap tidak dapat dijelaskan oleh variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan, melainkan faktor-faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

5. Kesimpulan dan Saran

Simpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan baik secara parsial maupun simultan tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal Aset Tetap pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Nilai koefisien determinasi (Adjusted R Square) sebesar -0,17, sehingga variabel Belanja Modal Aset Tetap tidak dapat dijelaskan oleh variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan melainkan faktor-faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan diatas maka penulis mencoba untuk memberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung diharapkan dapat lebih mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan daerah sehingga dapat meningkatkan penerimaan PAD, sehingga tercipta kemandirian daerah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya sehingga pada akhirnya ketergantungan terhadap pemerintah pusat yaitu Dana Perimbangan dapat dikurangi.
2. Pemerintah Daerah diharapkan dapat meningkatkan pengalokasian Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan untuk membiayai Belanja Modal yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan aset tetap Pemerintah Daerah. Selain itu Belanja Modal dalam bentuk aset tetap seperti peralatan dan infrastruktur dapat meningkatkan produktivitas perekonomian dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
3. Pemerintah Daerah harus lebih dapat mengefisienkan jumlah pegawai yang dimilikinya dengan cara lebih fokus pada kualitas pegawai daripada kuantitasnya dan pemanfaatan teknologi, dengan

begitu diharapkan Pemerintah bisa lebih menekan anggaran belanja pegawai yang selama ini menjadi pengeluaran terbesar Pemerintah dan lebih spesifik pada Belanja Modal dapat lebih mengefisienkan pengeluaran Belanja Modal.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Syukriy & Abdul Halim. 2006. Studi atas Belanja Modal Pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*. ISSN: 0216-8642, Vol. 2, No. 2.
- Aprizay, Yudi Satrya, Darwanis, dan Muhammad Arfan. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap pengalokasian Belanja Modal pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*. Banda Aceh.
- Darise, Nurlan. 2008. *Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)*. PT. Mancanan Jaya Cemerlang.
- Darwanto, dan Yulia Yustika. 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Simposium Nasional Akuntansi X*. 26-28 Juli, Makassar.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Laporan dan Realisasi APBD.2014. www.djpk.depkeu.go.id.
- Edison, Hendri H. Panggabean. 2009. *Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah di kabupaten toba samosir*. Pasca Sarjana : Universitas Sumatera Utara.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga. Jakarta : Salemba Empat.
- Mahmudi. 2011. *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta : UII Press.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sekor Publik*. Yogyakarta : Andi.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri. 2005. Nomor 58 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- _____ 2006. Nomor 13 Tahun 2006 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- _____ 2007. Nomor 59 *Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah. 2005. Nomor 24 Tahun 2005 *tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- _____ 2010. Nomor 71 tahun 2010 *tentang Standar Akuntansi Pemerintah untuk tujuan pelaporan keuangan*.
- Prakosa, Kesit Bambang. 2004. *Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah, Studi di Wilayah Propinsi Jawa Tengah dan DIY*.
- Rizanda, Ratna Pradita. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Surabaya*.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung : Alfabeta.
- Sulistiyowati, Diah. 2011. *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal*. Skripsi : Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro
- Tuasikal, Askam. 2008. Pengaruh DAU, DAK, PAD dan PDRB Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*.
- Undang-Undang Republik Indonesia. 2004. Nomor 32 Tahun 2004 *tentang Pemerintah Daerah*.
- _____ 2004. Nomor 33 Tahun 2004 *tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- _____ 2009. Nomor 28 Tahun 2009 *tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.